



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1469, 2017

LAN. Penetapan IKU. Tahun 2017-2019.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2019;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam sistem akuntabilitas kinerja dan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 22 Mei 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2017-2019

Daftar Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2017-2019

I. Lembaga Administrasi Negara			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas kebijakan	Kualitas kebijakan publik instansi hasil binaan LAN	<p>Diukur melalui dua aspek: kemanfaatan rekomendasi kebijakan dan utilisasi analisis kebijakan.</p> <p>a. Kemanfaatan rekomendasi kebijakan Diukur melalui pemenuhan kemanfaatan rekomendasi kebijakan setelah dihasilkan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Didiskusikan melalui forum seminar/diskusi b) Diunduh oleh pihak eksternal pascapublikasi di media elektronik internal c) Dipublikasikan pada media massa cetak tingkat lokal/nasional d) Dipublikasikan pada media massa elektronik tingkat lokal/nasional e) Diterima oleh <i>stakeholders</i> yang terkait sebagai perhatian untuk penyusunan/perbaikan kebijakan
			<p>(dibuktikan dengan tanda terima dan pernyataan) Pemenuhan atas setiap aspek kemanfaatan tersebut di atas diberikan nilai 0,20. Tingkat kemanfaatan diukur melalui rata-rata nilai kemanfaatan dari setiap hasil kajian kebijakan di LAN. Rata-rata nilai tersebut direvaluasi sebagai berikut. 0 - 0,25 → 0 - 2,5 >0,25 - 0,5 → >2,5 - 5 >0,5 - 0,75 → 5 - 7,5 >0,75 - 1,0 → 7,5 - 10</p> <p>b. Tingkat utilisasi analisis kebijakan Diukur melalui Indeks Utilisasi Analisis Kebijakan pada tahun berjalan.</p> <p>Nilai pada kedua aspek tersebut dirata-rata, lalu diinterpretasikan sebagai berikut. 0 - 2,5 = Buruk >2,5 - 5 = Kurang baik 5 - 7,5 = Baik 7,5 - 10 = Sangat baik</p>
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Tingkat efektivitas dan kualitas penyelenggaraan diklat oleh LAN dan lembaga penyelenggara diklat aparatur sesuai pedoman yang ditetapkan	<p>Diukur melalui rumus sebagai berikut.</p> $\left(\frac{P3D + PWI + PKA + PTF + PPK}{5} \right)$ <p>P3D: Lembaga diklat yang akreditasinya meningkat dibagi jumlah lembaga diklat yang diakreditasi pada tahun berjalan dikali 100.</p> <p>PWI: Tingkat pemahaman widyaiswara dan pembina kepegawaian atas kebijakan pembinaan widyaiswara.</p> <p>PKA: Persentase alumni pelatihan kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV yang</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>diselenggarakan LAN yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan diukur melalui evaluasi pascadiklat 6 s.d. 12 bulan setelah diklat).</p> <p>PTF: Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural sesuai tujuan diklat → Diukur melalui survey yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelatihan. Diklat yang diukur adalah ToC, MoT, TOT Revolusi Mental, TOT RLA, revolusi mental, RLA.</p> <p>PPK: Persentase ASN yang memiliki kompetensi baik hasil penilaian kompetensi yang dilakukan LAN.</p>
3	Meningkatnya pengembangan dan praktik inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah instansi pemerintah yang memanfaatkan model inovasi LAN	Diukur melalui jumlah K/L/D pemanfaat inovasi yang dihasilkan melalui model inovasi yang dikembangkan oleh LAN.
4	Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara	Persentase instansi pemerintah yang puas atas kualitas alumni STIA LAN	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan yang dilakukan kepada unit pembina kepegawaian pada instansi yang mengirim dan memanfaatkan alumni STIA LAN. Nilai yang dicantumkan adalah rata-rata dari nilai yang diperoleh seluruh STIA LAN.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga	Kualitas tata kelola internal LAN	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut.</p> $(RB + AKIP + BPK + SPIP) \times 5$ <p>RB= Predikat termutakhir evaluasi Reformasi Birokrasi LAN. Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>C = 1 D = 0</p> <p>AKIP= Predikat termutakhir evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAN. Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1 D = 0</p> <p>BPK= Opini BPK atas laporan keuangan LAN. Dinilai sebagai berikut. WTP = 4 WTP-DPP = 3 WDP = 2 Tidak Wajar = 1 Disclaimer = 0</p> <p>SPIP= Tingkat kematangan implementasi SPIP. Dinilai sebagai berikut. Level 5 = 4 Level 4 = 3 Level 3 = 2 Level 2 = 1 Level 1 = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>

II. Deputi Bidang Kajian Kebijakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian kebijakan	Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian kebijakan	Diukur melalui pemenuhan kemanfaatan rekomendasi kebijakan setelah dihasilkan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Didiskusikan melalui forum seminar/diskusi Diunduh oleh pihak eksternal pascapublikasi di media elektronik internal Dipublikasikan pada media massa cetak tingkat lokal/nasional Dipublikasikan pada media massa elektronik tingkat lokal/nasional Diterima oleh <i>stakeholders</i> yang terkait sebagai perhatian untuk penyusunan/perbaikan kebijakan (dibuktikan dengan tanda terima dan pernyataan) Pemenuhan atas setiap aspek kemanfaatan tersebut di atas diberikan nilai 0,20. Tingkat kemanfaatan diukur melalui rata-rata nilai kemanfaatan dari setiap hasil kajian kebijakan di LAN. Rata-rata nilai tersebut diinterpretasikan sebagai berikut. 0 – 0,25 = tidak bermanfaat >0,25 – 0,5 = kurang bermanfaat >0,5 – 0,75 = bermanfaat >0,75 – 1,0 = sangat bermanfaat
2	Terpenuhnya pemenuhan kebutuhan analisis kebijakan	Persentase pemenuhan kebutuhan analisis kebijakan (Tahap 1)	Kebutuhan analisis kebijakan pada tahun 2020 adalah 600 orang.
3	Tercapainya indeks utilisasi analisis kebijakan	Tingkat utilisasi analisis kebijakan	Diukur melalui Indeks Utilisasi Analisis Kebijakan pada tahun berjalan.

II.A. Pusat Kajian Reformasi Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang reformasi administrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang reformasi administrasi yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: <ol style="list-style-type: none"> Media elektronik internal; Media massa cetak tingkat lokal/nasional; dan/atau Media massa elektronik tingkat lokal/nasional.
2	Tersedianya <i>policy brief/policy note</i> di bidang reformasi administrasi	Jumlah <i>policy brief/policy note</i> di bidang reformasi administrasi yang diseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang diseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.
3	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan di bidang reformasi administrasi	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang reformasi administrasi Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang reformasi administrasi	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan. Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.

II.B. Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: <ol style="list-style-type: none"> Media elektronik internal; Media massa cetak tingkat lokal/nasional; dan/atau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			c. Media massa elektronik tingkat lokal/nasional.
2	Tersedianya <i>policy brief/policy note</i> di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Jumlah <i>policy brief/policy note</i> di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.
3	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.

II.C. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/nasional; dan/atau c. Media massa elektronik tingkat lokal/nasional.
2	Tersedianya <i>policy brief/policy note</i> di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Jumlah <i>policy brief/policy note</i> di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
3	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang desentralisasi dan otonomi daerah	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.

II.D. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pembinaan analisis kebijakan yang berkualitas	Persentase norma dan kebijakan pembinaan analisis kebijakan yang dihasilkan	Jumlah norma dan kebijakan pembinaan analisis kebijakan yang dimanatkan oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2013 adalah 6 (enam) peraturan. Indikator ini diukur dari pemenuhan seluruh kebutuhan norma dan kebijakan pembinaan analisis kebijakan tersebut <i>hingga</i> akhir tahun berjalan.
2	Terlaksananya pengembangan analisis kebijakan berbasis kompetensi	Persentase analisis kebijakan yang dikembangkan kompetensinya	Diukur melalui jumlah analisis kebijakan yang dikembangkan dibagi jumlah analisis kebijakan pada awal tahun dikali 100 persen. $\frac{\text{Jumlah AK dikembangkan}}{\text{Jumlah AK awal tahun } n} \times 100\%$
3	Terpenuhinya kebutuhan analisis kebijakan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah	Jumlah rekomendasi analisis kebijakan yang dihasilkan	Diukur melalui rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun berjalan berdasarkan uji kompetensi calon analisis kebijakan, perpindahan jabatan, ataupun <i>inpassing</i> .
4	Tersebarluaskannya informasi kebijakan	Jumlah publikasi Jurnal Analisis Kebijakan	Diukur melalui jumlah edisi publikasi Jurnal Analisis Kebijakan.
5	Tersedianya sistem informasi yang andal, mudah, dan cepat	Kualitas sistem informasi jabatan fungsional analisis kebijakan	Diukur melalui survey persepsi pengguna atas kualitas sistem informasi jabatan fungsional analisis kebijakan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			Pada tahun 2017, indikator ini diukur melalui jumlah sistem informasi jabatan fungsional analisis kebijakan yang terbangun.
6	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analisis kebijakan	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analisis kebijakan	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
7	Terselenggaranya evaluasi dan monitoring analisis kebijakan yang berkualitas	Kualitas pelayanan pembinaan analisis kebijakan	Diukur melalui survey kepuasan pelayanan pembinaan analisis kebijakan, meliputi seleksi calon analisis kebijakan; kebijakan pembinaan; advokasi dan sosialisasi; pengembangan analisis kebijakan (seminar, <i>public lecture</i> , bimtek).

III. Deputi Bidang Diklat Aparatur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya pembinaan dan penyelenggaraan kompetensi ASN yang berkualitas	Tingkat efektivitas dan kualitas penyelenggaraan diklat oleh LAN dan lembaga penyelenggara diklat aparatur sesuai pedoman yang ditetapkan	Diukur melalui rumus sebagai berikut. $\frac{(P3D + PWI + PKA + PTF + PPK)}{5}$ <p>P3D: Lembaga diklat yang akreditasinya meningkat dibagi jumlah lembaga diklat yang diakreditasi pada tahun berjalan dikali 100.</p> <p>PWI: Tingkat pemahaman widyaiswara dan pembina kepegawaian atas kebijakan pembinaan widyaiswara.</p> <p>PKA: Persentase alumni pelatihan kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV yang diselenggarakan LAN yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan diukur melalui evaluasi pascadiklat 6 s.d. 12 bulan setelah diklat).</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			PTF: Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural sesuai tujuan diklat → Diukur melalui survey yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelatihan. Diklat yang diukur adalah ToC, MoT, TOT Revolusi Mental, TOT RLA, revolusi mental, dan RLA. PPK: Persentase ASN yang memiliki kompetensi baik hasil penilaian kompetensi yang dilakukan LAN.

IV.A. Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terpenuhinya kebutuhan dokumen kebijakan pengembangan kompetensi ASN	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan pengembangan kompetensi ASN	Diukur melalui jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan terkait pengembangan kompetensi ASN yang ditetapkan pada tahun berjalan.
2	Terjaminnya kualitas lembaga diklat pemerintah (kepatuhan lembaga diklat terhadap standard)	Persentase lembaga diklat yang dipantau	Diukur melalui jumlah lemdik yang dipantau dibagi jumlah target lemdik yang dipantau pada tahun berjalan dikali 100 persen.
3	Terakreditasinya lembaga diklat pemerintah	Jumlah lembaga diklat yang terakreditasi	Diukur melalui jumlah lembaga diklat kementerian/lembaga/pemda yang berhasil diakreditasi sesuai target yang seharusnya diproses akreditasi pada tahun berjalan.
4	Meningkatnya jejaring kerja Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat dengan <i>stakeholders</i>	Persentase lembaga diklat yang menerima sosialisasi/bimtek kebijakan diklat	Diukur melalui jumlah lemdik yang menerima pembinaan sebagai peserta rapat koordinasi/sosialisasi/workshop/bimtek dibagi jumlah target lemdik pada tahun berjalan dikali 100 persen.
		Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Diklat Aparatur	Diukur melalui $\frac{\sum \text{lemdik menggunakan SIDA}}{\sum \text{lemdik terdaftar SIDA}} \times 100\%$ Kriteria:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>≥90% s.d. 100% = Sangat Baik ≥80% s.d. <90% = Baik ≥70% s.d. <80% = Cukup Baik <70% = Kurang Baik</p>

III.B. Pusat Pembinaan Widyaiswara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya kualitas kebijakan pembinaan dan pengembangan widyaiswara	Jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan pembinaan dan pengembangan kewidyaiswaraan	Diukur melalui jumlah kebijakan/pedoman/konsep/instrumen/uji coba kebijakan dalam rangka pembinaan kewidyaiswaraan yang diterbitkan pada tahun berjalan.
		Persentase widyaiswara yang menerima pembinaan	Diukur melalui jumlah widyaiswara yang menerima pembinaan sebagai peserta rapat koordinasi/ sosialisasi/workshop dibagi jumlah target widyaiswara yang dibina pada tahun berjalan dikali 100 persen.
2	Terwujudnya peningkatan kinerja widyaiswara	Persentase hasil evaluasi kinerja widyaiswara	Diukur melalui jumlah dokumen evaluasi kinerja yang berhasil diproses/dievaluasi dibagi jumlah dokumen evaluasi kinerja Widyaiswara yang seharusnya diproses/dievaluasi pada tahun berjalan dikali 100 persen.
3	Terwujudnya peningkatan layanan administrasi dan informasi kewidyaiswaraan	Tingkat kepuasan pelayanan kewidyaiswaraan	Diukur melalui survey kepuasan pelayanan kewidyaiswaraan. Nilai yang dicantumkan adalah rerata hitung atas kepuasan pelayanan pembinaan widyaiswara, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Seleksi calon widyaiswara; • Kebijakan pembinaan; • Pengembangan widyaiswara; dan • Dokumen penilaian kinerja widyaiswara.

III.C. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan diklat bahasa yang berkualitas	Persentase pelatihan kepemimpinan yang terselenggara sesuai standard	Diukur berdasarkan jumlah pelatihan kepemimpinan yang terselenggara sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan yang ditetapkan oleh LAN dibagi jumlah seluruh pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan pada tahun berjalan dikali 100 persen.
2	Meningkatnya tingkat reaksi peserta atas penyelenggaraan diklat kepemimpinan dan diklat bahasa	Tingkat reaksi peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan	Diukur melalui survey reaksi pada akhir setiap penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan. Nilai yang menjadi dasar pengukuran adalah rata-rata seluruh reaksi peserta dari seluruh penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan pada tahun berjalan. Kriteria: ≥90 s.d. 100 = Sangat Baik ≥80 s.d. <90 = Baik ≥70 s.d. <80 = Cukup Baik <70 = Kurang Baik
		Tingkat reaksi peserta terhadap penyelenggaraan Diklat Bahasa	Diukur melalui survey reaksi pada akhir setiap penyelenggaraan Diklat Bahasa. Nilai yang menjadi dasar pengukuran adalah rata-rata seluruh reaksi peserta dari seluruh penyelenggaraan Diklat Bahasa pada tahun berjalan. Kriteria: ≥90 s.d. 100 = Sangat Baik ≥80 s.d. <90 = Baik ≥70 s.d. <80 = Cukup Baik <70 = Kurang Baik
3	Meningkatnya pemahaman atas produk pembelajaran dari peserta diklat kepemimpinan	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan	Diukur melalui jumlah alumni Diklat Kepemimpinan yang menerapkan inovasi/proyek perubahan dalam jangka pendek pascadiklat Kepemimpinan dibagi jumlah alumni Diklat Kepemimpinan dalam jangka pendek (s.d. 3 bulan) dikali 100 persen.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		Persentase alumni Diklat Kepemimpinan yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan Mei, maka pengukuran atas indikator ini dilakukan pada tahun n+1.

III.D. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional yang berkualitas	Persentase pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang terselenggara sesuai standard	Diukur berdasarkan jumlah pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang terselenggara sesuai pedoman penyelenggaraan pelatihan yang telah ditetapkan oleh instansi pembina dibagi jumlah keseluruhan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural yang diselenggarakan pada tahun berjalan dikali 100 persen.
		Tingkat reaksi peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural	Diukur melalui survey reaksi pada akhir setiap penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Nilai yang menjadi dasar pengukuran adalah rata-rata seluruh reaksi peserta dari seluruh penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural pada tahun berjalan. Kriteria: ≥90 s.d. 100 = Sangat Baik ≥80 s.d. <90 = Baik ≥70 s.d. <80 = Cukup Baik <70 = Kurang Baik
		Tingkat pembelajaran (<i>learning</i>) peserta pascapelatihan teknis fungsional, dan sosial kultural	Diukur melalui uji pra dan pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Nilai yang dicantumkan adalah persentase peserta yang mengalami kenaikan tingkat pengetahuan pada uji pascapelatihan teknis.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		Persentase alumni pelatihan yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Survey dilakukan kepada alumni dan/atau atasan alumni setelah 6-9 bulan mengikuti pelatihan dengan target kompetensi yang direncanakan pada masing-masing pelatihan.

IV. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya pengembangan dan praktik inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah satuan kerja di K/L/D (termasuk desa dan kelurahan) yang memanfaatkan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah satuan kerja di K/L/D, termasuk desa, yang memanfaatkan produk inovasi hasil Laboratorium Inovasi serta Inovasi Desa dan Kelurahan (<i>Street-Level Innovation</i>).

IV.A. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui inovasi sektor publik	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
		Jumlah model atau desain inovasi di bidang tata pemerintahan	Diukur melalui jumlah model atau desain inovasi di bidang tata pemerintahan yang dihasilkan pada tahun berjalan.
2	Tersedianya data dan informasi inovasi tata pemerintahan	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang tata pemerintahan	Diukur melalui jumlah informasi produk inovasi tata pemerintahan yang dipamerkan dalam dokumen tercetak, dipublikasikan pada website/media sosial, dan diunduh oleh publik.
3	Terlaksananya advokasi/asistensi/ konsultasi bidang inovasi tata pemerintahan	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/ konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.

IV.B. Pusat Inovasi Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terciptanya inovasi pelayanan publik yang akuntabel, transparan, berkualitas	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
		Jumlah model atau desain inovasi di bidang pelayanan publik	Diukur melalui jumlah model atau desain inovasi di bidang pelayanan publik yang dihasilkan pada tahun berjalan.
2	Tersedianya data dan informasi inovasi pelayanan publik	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang pelayanan publik	Diukur melalui jumlah informasi produk inovasi pelayanan publik yang dipamerkan dalam dokumen tercetak, dipublikasikan pada website/media sosial, dan diunduh oleh publik.
3	Terlaksananya advokasi/asistensi/konsultasi bidang inovasi pelayanan publik	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.

IV.C. Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya inovasi di sektor publik berbasis <i>co-creation</i>	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
2	Tersedianya data dan informasi inovasi di sektor publik	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur	Diukur melalui jumlah informasi produk inovasi kelembagaan dan sumber daya aparatur yang dipamerkan dalam dokumen tercetak, dipublikasikan pada website/media sosial, dan diunduh oleh publik.
3	Tersedianya saran dan rekomendasi isu-isu strategis di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang kelembagaan dan sumber daya aparatur yang diseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	Rekomendasi kebijakan yang diseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
4	Terlaksananya advokasi/asistensi/konsultasi bidang inovasi kelembagaan dan sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.

IV.D. Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terlaksananya promosi inovasi dan pengembangan kapasitas di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
		Jumlah promosi inovasi administrasi negara	Diukur melalui $\sum_{i=1}^n PIPC + PIP + PIU + PIS$ <ul style="list-style-type: none"> • PIPC : Jumlah produk inovasi yang dipamerkan (dokumen tercetak), • PIP : Jumlah produk inovasi yang dipublikasikan pada website, dan media sosial • PIU : Jumlah inovasi yang diakses/diunduh oleh publik • PIS: Jumlah produk inovasi yang disebarluaskan melalui kegiatan apresiasi, festival, gala meeting, dan lain-lain
2	Tersebarluaskannya data dan informasi produk inovasi administrasi negara	<i>Updating</i> dokumentasi dan publikasi dari produk inovasi bidang administrasi negara	Diukur melalui jumlah informasi produk inovasi administrasi negara yang dipamerkan dalam dokumen tercetak, dipublikasikan pada website/media sosial, dan diunduh oleh publik.
3	Terlaksananya kerja sama di bidang inovasi administrasi negara	Jumlah kerja sama di bidang inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah perjanjian kerja sama (PKS) antara LAN dan instansi pemerintah lainnya di bidang inovasi administrasi negara yang ditandatangani pada tahun berjalan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
4	Terlaksananya advokasi/asistensi/konsultasi bidang inovasi administrasi negara	Jumlah kegiatan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada instansi pemerintah	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/asistensi/konsultasi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.

V. Sekretariat Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional serta lembaga yang akuntabel dan bebas KKN	Kualitas tata kelola internal LAN	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut. $(RB + AKIP + BPK) \times 6,25$</p> <p>RB= Predikat termutakhir evaluasi Reformasi Birokrasi LAN. Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1 D = 0</p> <p>AKIP= Predikat termutakhir evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAN. Dinilai sebagai berikut. AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1 D = 0</p> <p>BPK= Opini BPK atas laporan keuangan LAN. Dinilai sebagai berikut. WTP = 4 WTP-DPP = 3 WDP = 2</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>Tidak Wajar = 1 Disclaimer = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>
		Tingkat kepuasan pengguna layanan Sekretariat Utama	Diukur melalui pengolahan data lanjutan atas survey kepuasan pengguna layanan unit-unit kerja di bawah Sekretariat Utama. Nilai yang diukur adalah rata-rata dari tingkat kepuasan pada unit-unit kerja tersebut.

V.A. Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya pelayanan Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol yang responsif, cepat, tepat, partisipatif, dan akuntabel	Kualitas pengelolaan perencanaan, hukum, hubungan masyarakat, dan protokol	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut. $(DIPA + REV + RBA + RBH + RBO + LIP + PEGI + AA) \times 3,0304$</p> <p>DIPA= persentase deviasi halaman 3 DIPA. Dinilai sebagai berikut. <20% = 4 20% - 25% = 3 <25% - 30% = 2 <30% - 35% = 1 >35% = 0</p> <p>REV= Jumlah rata-rata revisi anggaran seluruh Satker. Dinilai sebagai berikut. ≤6 revisi = 4 7 - 8 revisi = 3 9 - 10 revisi = 2 10 - 11 revisi = 1 >11 revisi = 0</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>RBA= Skor Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit subkomponen penguatan akuntabilitas. Dinilai sebagai berikut. >5 s.d. 6 = 5 >4 s.d. ≤5 = 4 >3 s.d. ≤4 = 3 >2 s.d. ≤3 = 2 >1 s.d. ≤2 = 1 0 s.d. ≤1 = 0</p> <p>RBH= Skor Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit subkomponen penataan peraturan perundang-undangan. Dinilai sebagai berikut. >4 s.d. 5 = 4 >3 s.d. ≤4 = 3 >2 s.d. ≤3 = 2 >1 s.d. ≤2 = 1 0 s.d. ≤1 = 0</p> <p>RBO= Skor evaluasi Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit subkomponen penataan organisasi. Dinilai sebagai berikut. >5 s.d. 6 = 5 >4 s.d. ≤5 = 4 >3 s.d. ≤4 = 3 >2 s.d. ≤3 = 2 >1 s.d. ≤2 = 1 0 s.d. ≤1 = 0</p> <p>LIP= Diukur dari pemenuhan unsur-unsur Laporan Informasi Publik:</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<ul style="list-style-type: none"> Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik Rincian pelayanan permohonan informasi Rincian penyelesaian sengketa informasi publik Capaian, kendala, dan rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik. <p>Pemenuhan setiap unsur memperoleh nilai 1, sehingga nilai maksimal adalah 4.</p> <p>PEGI= Skor termutakhir pemeringkatan e-government Indonesia. Dinilai sebagai berikut. ≥3,5 = 3 2,5 - 3,49 = 2 1,5 - 2,49 = 1 <1,5 = 0</p> <p>AA= Nilai termutakhir akreditasi kearsipan LAN sesuai pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina kearsipan. Dinilai sebagai berikut. Terakreditasi AA = 4 Terakreditasi A = 3 Terakreditasi B = 2 Terakreditasi C = 1 Tidak Terakreditasi = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>
		Tingkat kepuasan pengguna layanan Biro PH2P	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan Biro PH2P, baik pengguna layanan individual maupun pengguna layanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			representasi unit kerja. Nilai yang diukur adalah rata-rata tingkat kepuasan pengguna layanan.

V.B. Biro Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya pelayanan Biro Umum yang responsif, cepat, tepat, partisipatif, dan akuntabel	Kualitas pengelolaan SDM, keuangan, pengadaan barang/jasa, dan barang milik negara	<p>Diukur melalui formula sebagai berikut. $(LK + RA + SDM + BMN + BJ) \times 5$</p> <p>LK = Persentase laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Standard Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dinilai sebagai berikut. 95%-100% tepat waktu = 4 90%-94% tepat waktu = 3 85%-89% tepat waktu = 2 80%-84% tepat waktu = 1 <80% tepat waktu = 0</p> <p>RA = Persentase penyerapan anggaran. Dinilai sebagai berikut. ≥90% = 4 85% - 89,99% = 3 80% - 84,99% = 2 75% - 79,99% = 1 <75% = 0</p> <p>SDM = Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan pegawai. Dinilai sebagai berikut. ≥90% = 4 85% - 89% = 3 80% - 84% = 2 75% - 79% = 1 <75% = 0</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>BMN = Persentase laporan BMN disampaikan tepat waktu. Dinilai sebagai berikut. 95%-100% tepat waktu = 4 90%-94% tepat waktu = 3 85%-89% tepat waktu = 2 80%-84% tepat waktu = 1 <80% tepat waktu = 0</p> <p>BJ = Persentase realisasi pengadaan barang/jasa. Dinilai sebagai berikut. ≥95% = 4 90% - 94% = 3 85% - 89% = 2 80% - 84% = 1 <80% = 0</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>
		Tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan Biro Umum, baik pengguna layanan individual maupun pengguna layanan representasi unit kerja. Nilai yang diukur adalah rata-rata tingkat kepuasan pengguna layanan.

VI. Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di LAN yang transparan, akuntabel, dan bebas KKN serta independen	Tingkat efektivitas asistensi atas <i>risk management</i> dan hasil temuan	Tingkat efektivitas asistensi atas risk management dan hasil temuan, diukur dari capaian beberapa komponen yaitu presentase tindak lanjut hasil temuan, laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan, dokumen reuiu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>dan evaluasi yang berhasil diselesaikan, kesesuaian kebijakan internal pengawasan, serta tingkat penerapan pengendalian intern di unit-unit kerja.</p> $\text{TEARMHT} = [\text{THP} \times 0,15] + [\text{LHP} \times 0,15] + [\text{DR} \times 0,125] + [\text{DE} \times 0,125] + [\text{PPPK} \times 0,125] + [\text{IACM} \times 0,1] + [\text{KKI} \times 0,125] + [\text{PPI} \times 0,1]$ <p>THP = Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK dan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti.</p> <p>LHP = Persentase dokumen laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan dan ditindaklanjuti.</p> <p>DR = Persentase dokumen hasil reu yang diterbitkan.</p> <p>DE = Persentase dokumen evaluasi yang diterbitkan.</p> <p>PPPK = Persentase pemantauan pelaksanaan aksi PPK.</p> <p>IACM = Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)</p> <p>KKI = Persentase kesesuaian kebijakan internal di bidang pengawasan.</p> <p>PPI = Tingkat penerapan pengendalian intern, dikonversi sebagai berikut : 5 unsur SPIP diterapkan = 100 4 unsur SPIP diterapkan = 90</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>3 unsur SPIP diterapkan = 80 2 unsur SPIP diterapkan = 70 1 unsur SPIP diterapkan = 60</p>

VII. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A)

VII.A. PKP2A I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/nasional; dan/atau c. Media massa elektronik tingkat lokal/nasional.
		Jumlah <i>policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan Mei, maka pengukuran atas indikator ini dilakukan pada tahun n+1.
		Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Survey dilakukan kepada alumni dan/atau atasan alumni setelah 6-9 bulan mengikuti pelatihan dengan target kompetensi yang direncanakan pada masing-masing pelatihan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		Jumlah pegawai ASN yang dinilai kompetensinya	Diukur melalui jumlah pegawai ASN, baik pegawai LAN maupun pegawai instansi pemerintah lainnya, yang diukur kompetensinya pada tahun berjalan.
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A I yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A I LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A I	Diukur melalui formula sebagai berikut. $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (UP \times 0,1) + (DIPA \times 0,1) + (SDM \times 0,3)$ KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A SAKIP = Nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PKP2A sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. RA = Persentase realisasi anggaran UP = Persentase GUP yang tepat waktu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			DIPA = Gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana selama 1 tahun. Diinterpretasi sesuai dengan instrumen evaluasi pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan sebagai berikut. $<25\% = 100$ $25\% - 34,99\% = 85$ $35\% - 49,99\% = 70$ $\geq 50\% = 60$ SDM = Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui diklat, mentoring, magang, coaching, seminar, studi banding, bimtek, dan lain-lain. Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk

VII.B. PKP2A II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/nasional; dan/atau c. Media massa elektronik tingkat lokal/nasional.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		Jumlah <i>policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan Mei, maka pengukuran atas indikator ini dilakukan pada tahun n+1.
		Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Survey dilakukan kepada alumni dan/atau atasan alumni setelah 6-9 bulan mengikuti pelatihan dengan target kompetensi yang direncanakan pada masing-masing pelatihan.
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A II yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A II LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A II	Diukur melalui formula sebagai berikut. $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (UP \times 0,1) + (DIPA \times 0,1) + (SDM \times 0,3)$ <p>KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A</p> <p>SAKIP = Nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PKP2A sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>RA = Persentase realisasi anggaran</p> <p>UP = Persentase GUP yang tepat waktu</p> <p>DIPA = Gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana selama 1 tahun. Diinterpretasi sesuai dengan instrumen evaluasi pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan sebagai berikut.</p> <p><25% = 100 25% - 34,99% = 85 35% - 49,99% = 70 ≥50% = 60</p> <p>SDM = Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui diklat, mentoring, magang, coaching, seminar, studi banding, bimtek, dan lain-lain.</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk

VII.C. PKP2A III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/nasional; dan/atau c. Media massa elektronik tingkat lokal/nasional.
		Jumlah <i>policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan Mei, maka pengukuran atas indikator ini dilakukan pada tahun n+1.
		Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Survey dilakukan kepada alumni dan/atau atasan alumni setelah 6-9 bulan mengikuti pelatihan dengan target kompetensi yang direncanakan pada masing-masing pelatihan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A III yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A III LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A III	Diukur melalui formula sebagai berikut. $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (UP \times 0,1) + (DIPA \times 0,1) + (SDM \times 0,3)$ KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A SAKIP = Nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PKP2A sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. RA = Persentase realisasi anggaran UP = Persentase GUP yang tepat waktu DIPA = Gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana selama 1 tahun. Diinterpretasi sesuai dengan instrumen evaluasi pelaksanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>anggaran dari Kementerian Keuangan sebagai berikut.</p> <p><25% = 100 25% - 34,99% = 85 35% - 49,99% = 70 ≥50% = 60</p> <p>SDM = Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui diklat, mentoring, magang, coaching, seminar, studi banding, bimtek, dan lain-lain.</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>

VII.D. PKP2A IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara	Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik	Rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik adalah yang dimuat/diberitakan/dipublikasikan pada sekurang-kurangnya 2 dari 3 media berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Media elektronik internal; b. Media massa cetak tingkat lokal/nasional; dan/atau c. Media massa elektronik tingkat lokal/nasional.
		Jumlah <i>policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i>	<i>Policy brief/policy note</i> yang didiseminasikan kepada <i>stakeholders</i> adalah <i>policy brief/policy note</i> yang diterima oleh K/L/D terkait (dibuktikan melalui tanda terima) dan/atau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			disampaikan dalam seminar/diskusi yang mengundang pihak K/L/Pemda terkait.
2	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan	Diukur melalui evaluasi pascadiklat yang dilakukan 6 s.d. 12 bulan setelah pelaksanaan Diklat Kepemimpinan. Apabila Diklat Kepemimpinan berakhir setelah bulan Mei, maka pengukuran atas indikator ini dilakukan pada tahun n+1.
		Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai tujuan pelatihan	Diukur melalui survey kompetensi pascapelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural. Survey dilakukan kepada alumni dan/atau atasan alumni setelah 6-9 bulan mengikuti pelatihan dengan target kompetensi yang direncanakan pada masing-masing pelatihan.
3	Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang administrasi negara	Jumlah gagasan dan produk inovasi yang merupakan hasil <i>co-creation</i>	Diukur melalui jumlah gagasan dan produk inovasi yang dihasilkan bersama-sama instansi pemerintah lain pada tahun berjalan melalui model inovasi yang dikembangkan LAN.
4	Terselenggaranya layanan advokasi/fasilitasi/asistensi kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui jumlah layanan advokasi/fasilitasi/asistensi yang diberikan kepada K/L/D pada tahun berjalan.
		Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara	Diukur melalui survey kepuasan pengguna layanan advokasi/fasilitasi/asistensi pada tahun berjalan.
5	Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A IV yang profesional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A IV LAN	Kualitas penyelenggaraan tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A IV	Diukur melalui formula sebagai berikut. $KUS = (SAKIP \times 0,3) + (RA \times 0,2) + (UP \times 0,1) + (DIPA \times 0,1) + (SDM \times 0,3)$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			<p>KUS = Kualitas tata kelola urusan kesekretariatan di PKP2A</p> <p>SAKIP = Nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PKP2A sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>RA = Persentase realisasi anggaran</p> <p>UP = Persentase GUP yang tepat waktu</p> <p>DIPA = Gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana selama 1 tahun. Diinterpretasi sesuai dengan instrumen evaluasi pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan sebagai berikut.</p> <p><25% = 100 25% - 34,99% = 85 35% - 49,99% = 70 ≥50% = 60</p> <p>SDM = Persentase pegawai yang dikembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui diklat, mentoring, magang, coaching, seminar, studi banding, bimtek, dan lain-lain.</p> <p>Nilai akhir dari penghitungan formula di atas direvaluasi sebagai berikut. 75 s.d. 100 = Sangat Baik 50 s.d. <75 = Baik 25 s.d. <50 = Buruk 0 s.d. <25 = Sangat Buruk</p>

VIII. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi

VIII.A. STIA LAN Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di STIA LAN	Persentase lulusan STIA dengan IPK Baik dan masa studi normal	Diukur dengan kriteria sebagai berikut. Lulusan S1: IPK minimal 3,00; masa studi <70% masa studi maksimal (12 semester) Lulusan S2: IPK minimal 3,25; masa studi <70% masa studi maksimal (8 semester) Nilai yang diukur adalah hasil pembagian dari lulusan yang memenuhi kriteria tersebut di atas dibandingkan dengan total lulusan pada tahun berjalan dikali 100 persen.
		Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam media ilmiah/ publikasi nasional/internasional	Diukur berdasarkan jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh pegawai ASN di STIA LAN yang dipublikasikan dalam media ilmiah/publikasi nasional/internasional pada tahun berjalan. Jenis-jenis publikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Buku/bunga rampai/proceeding (memiliki ISBN) • Jurnal/berkala ilmiah (memiliki ISSN)
		Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang dilakukan STIA	Diukur melalui survey persepsi penerima manfaat pengabdian masyarakat.
		Persentase dosen yang telah tersertifikasi	Diukur melalui jumlah dosen tetap yang tersertifikasi dibagi jumlah total dosen tetap dikali 100 persen.

VIII.B. STIA LAN Bandung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di STIA LAN	Persentase lulusan STIA dengan IPK Baik dan masa studi normal	Diukur dengan kriteria sebagai berikut. Lulusan S1: IPK minimal 3,00; masa studi <70% masa studi maksimal (12 semester) Lulusan S2: IPK minimal 3,25; masa studi <70% masa studi maksimal (8 semester) Nilai yang diukur adalah hasil pembagian dari lulusan yang memenuhi kriteria tersebut di atas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
			dibandingkan dengan total lulusan pada tahun berjalan dikali 100 persen.
		Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam media ilmiah/ publikasi nasional/internasional	Diukur berdasarkan jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh pegawai ASN di STIA LAN yang dipublikasikan dalam media ilmiah/publikasi nasional/internasional pada tahun berjalan. Jenis-jenis publikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Buku/bunga rampai/proceeding (memiliki ISBN) • Jurnal/berkala ilmiah (memiliki ISSN)
		Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang dilakukan STIA	Diukur melalui survey persepsi penerima manfaat pengabdian masyarakat.
		Persentase dosen yang telah tersertifikasi	Diukur melalui jumlah dosen tetap yang tersertifikasi dibagi jumlah total dosen tetap dikali 100 persen.

VIII.C. STIA LAN Makassar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi di STIA LAN	Persentase lulusan STIA dengan IPK Baik dan masa studi normal	Diukur dengan kriteria sebagai berikut. Lulusan S1: IPK minimal 3,00; masa studi <70% masa studi maksimal (12 semester) Lulusan S2: IPK minimal 3,25; masa studi <70% masa studi maksimal (8 semester) Nilai yang diukur adalah hasil pembagian dari lulusan yang memenuhi kriteria tersebut di atas dibandingkan dengan total lulusan pada tahun berjalan dikali 100 persen.
		Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam media ilmiah/ publikasi nasional/internasional	Diukur berdasarkan jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh pegawai ASN di STIA LAN yang dipublikasikan dalam media ilmiah/publikasi nasional/internasional pada tahun berjalan. Jenis-jenis publikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Buku/bunga rampai/proceeding (memiliki ISBN) • Jurnal/berkala ilmiah (memiliki ISSN)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi dan Cara Pengukuran
		Tingkat kemanfaatan pengabdian masyarakat yang dilakukan STIA	Diukur melalui survey persepsi penerima manfaat pengabdian masyarakat.
		Persentase dosen yang telah tersertifikasi	Diukur melalui jumlah dosen tetap yang tersertifikasi dibagi jumlah total dosen tetap dikali 100 persen.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO